



Seragam dan Pembentukan Identitas Militer Nasional: Badan Keamanan Rakyat dalam Revolusi Indonesia, 1945–1946

Uniforms and the Formation of National Military Identity: The People's Security Body in the Indonesian Revolution, 1945–1946

Nadia Sasti Andini; Yudi Subianto; Satria Nugraha

Program Studi Sejarah Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
Republik Indonesia

Email: nadiaandini119@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis seragam Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada fase awal Revolusi Indonesia 1945–1946 sebagai artefak budaya material, teknologi sosial, dan medium pembentukan identitas militer nasional. Berangkat dari persoalan bahwa historiografi pembentukan angkatan bersenjata Indonesia lebih sering menekankan organisasi, kepemimpinan, pertempuran, dan hubungan sipil–militer, penelitian ini memindahkan perhatian pada pakaian, atribut, lencana, ikat lengan, penutup kepala, warna, serta praktik penggunaan kembali seragam Jepang dan KNIL. Penelitian menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dipadukan dengan analisis budaya material dan pembacaan visual. Sumber primer berupa arsip, keputusan pemerintah, foto sezaman, dan dokumentasi organisasi militer awal dibaca secara silang dengan literatur nasional dan internasional mengenai Revolusi Indonesia, pembentukan TNI, budaya material, seragam, simbol visual, dan identitas militer. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, heterogenitas seragam BKR bukan semata indikator kelemahan logistik, melainkan jejak material dari proses integrasi personel PETA, Heiho, KNIL, pemuda, dan laskar ke dalam otoritas Republik. Kedua, penghapusan insignia kolonial dan Jepang serta penambahan Merah Putih menghasilkan proses dekolonisasi visual: benda lama diberi makna politik baru. Ketiga, seragam bekerja sebagai mekanisme legitimasi, disiplin, pengenalan kawan–lawan, dan pembentukan solidaritas, meskipun standardisasi nasional belum tercapai. Dengan demikian, identitas militer Indonesia tidak lahir setelah uniformitas tercipta; sebaliknya, uniformitas berkembang melalui negosiasi material dan simbolik di tengah revolusi. Artikel ini menawarkan kontribusi pada historiografi militer Indonesia dengan menempatkan seragam sebagai sumber sejarah yang aktif dalam proses institusionalisasi kekuatan bersenjata Republik.

Kata kunci: *Badan Keamanan Rakyat; seragam militer; budaya material; identitas militer; dekolonisasi visual; Revolusi Indonesia.*

ABSTRACT

This article examines the uniforms of the People's Security Agency (Badan Keamanan Rakyat/BKR) during the early Indonesian Revolution of 1945–1946 as material-culture artefacts, social technologies, and media through which a national military identity was negotiated. While the historiography of Indonesia's armed forces has largely privileged organization, leadership, combat, and civil–military relations, this study focuses on clothing, badges, armbands, headgear, colours, and the reuse of Japanese and KNIL uniforms. Employing the historical method—heuristics, source criticism, interpretation, and historiography—the study combines material-culture analysis with visual reading. Archival materials, government decisions, contemporary photographs, and early military documentation are cross-read with national and international scholarship on the Indonesian Revolution, the formation of the TNI, material culture, visual symbolism, uniforms, and military identity. The findings demonstrate that, first, uniform heterogeneity was not merely a symptom of logistical scarcity but a material trace of the integration of PETA, Heiho, KNIL, youth, and militia personnel into Republican authority. Second, the removal of colonial and Japanese insignia, along with the addition of red-and-white symbols, constituted a process of visual decolonisation in which inherited objects acquired new political meanings. Third, uniforms operated as instruments of legitimacy, discipline, recognition, and solidarity even before national standardization was achieved. Military identity, therefore, did not emerge after uniformity; rather, uniformity itself developed through material and symbolic negotiation during revolution.

Keywords: *People's Security Agency; military uniform; material culture; military identity; visual decolonization; Indonesian Revolution.*

PENDAHULUAN

Proklamasi 17 Agustus 1945 melahirkan negara yang secara yuridis-politik menyatakan kemerdekaan, tetapi belum memiliki perangkat pertahanan yang sepenuhnya terlembaga. Kekalahan Jepang, kedatangan Sekutu, kembalinya kepentingan kolonial Belanda melalui NICA, serta mobilisasi pemuda menciptakan ruang politik dan keamanan yang sangat cair. Dalam ruang inilah Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk pada 22 Agustus 1945. Literatur mengenai genealogi TNI menunjukkan bahwa BKR penting bukan hanya sebagai organisasi transisional, tetapi sebagai arena pertemuan berbagai tradisi keprajuritan—PETA, Heiho, KNIL, pemuda, dan laskar—yang sebelumnya berada dalam struktur komando, pendidikan, dan pengalaman politik yang berbeda (Nugrahanto, 2018; Idris et al., 2022; Sofuan, 2022; Utama, 2024).

Naskah awal artikel ini telah tepat menempatkan keragaman seragam sebagai salah satu ciri menonjol BKR: bekas seragam Jepang, pakaian lapangan warisan kolonial, pakaian sipil yang dimodifikasi, ikat lengan, lencana, dan tanda pengenal sederhana. Namun, keragaman tersebut perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar akibat kelangkaan perlengkapan. Dalam perspektif budaya material, benda tidak bersifat pasif. Material, bentuk, cara pemakaian, perubahan atribut, dan konteks sirkulasinya menyimpan informasi mengenai relasi sosial dan struktur kekuasaan (Prown, 1982; Woodward, 2007). Karena itu, seragam dapat diperlakukan sebagai “arsip material” yang memperlihatkan bagaimana negara yang baru lahir berusaha membuat otoritasnya terlihat pada tubuh para anggotanya.

Kajian tentang seragam militer menegaskan bahwa pakaian dinas mempunyai fungsi ganda. Pada satu sisi, ia memenuhi kebutuhan praktis: membedakan kombatan, memudahkan pengenalan, menandai pangkat, dan mendukung disiplin. Pada sisi lain, seragam membentuk identitas kolektif dan menampilkan hubungan antara individu dengan institusi. Uniformitas menyederhanakan perbedaan personal dan mengubah tubuh menjadi representasi organisasi; insignia dan atribut, sebaliknya, mengatur perbedaan internal berdasarkan pangkat, fungsi, dan kesatuan (Joseph & Alex, 1972; Craik, 2005; Tynan, 2013; Stanar, 2023). Dalam konteks pascakolonial, simbol visual juga dapat menjadi arena dekolonisasi karena institusi baru sering mewarisi bentuk material rezim lama sambil mengubah tanda, nama, dan maknanya (Stapleton, 2021).

Persoalan tersebut sangat relevan bagi BKR. Republik tidak memulai pembangunan militernya dari ruang kosong. Personel membawa pakaian, pengalaman latihan, disiplin, dan simbol dari rezim sebelumnya. Kajian mengenai PETA dan KNIL memperlihatkan bahwa keduanya mewariskan kultur latihan yang berbeda: KNIL menekankan profesionalisme militer kolonial dan pemisahan relatif dari masyarakat sipil, sedangkan PETA berkembang di bawah mobilisasi Jepang yang menautkan militerisasi, nasionalisme, dan kedekatan dengan masyarakat (Utama, 2024). Rivalitas dan perbedaan latar tersebut kemudian ikut mewarnai pembentukan

tentara Republik (Sofuan, 2022). Jika organisasi adalah wadah integrasi, seragam merupakan salah satu permukaan paling kasatmata tempat integrasi itu dinegosiasikan.

Studi ini berangkat dari tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana bentuk, karakteristik, dan variasi seragam BKR pada 1945–1946 dapat dijelaskan dalam konteks keterbatasan logistik dan pluralitas asal-usul personel? Kedua, bagaimana penggunaan kembali, penghilangan, dan penambahan simbol pada pakaian militer menghasilkan identitas politik baru? Ketiga, sejauh mana seragam berfungsi dalam pembentukan legitimasi, disiplin, solidaritas, dan institusionalisasi militer Republik? Pertanyaan tersebut menggeser fokus dari “seperti apa seragam BKR” menuju “apa yang dilakukan seragam dalam proses pembentukan militer nasional”.

Kebaruan artikel terletak pada integrasi sejarah militer dengan material culture studies dan analisis simbol visual. Sejumlah studi nasional telah membahas BKR sebagai cikal bakal TNI, kontribusi PETA, rivalitas PETA–KNIL, serta perkembangan organisasi militer awal (Nugrahanto, 2018; Idris et al., 2022; Utama, 2024). Sementara itu, kajian internasional menunjukkan produktivitas pembacaan seragam sebagai medium identitas, moralitas profesi, gender, kolonialisme, dan dekolonisasi (Stapleton, 2021; Lahiri, 2024; Stanar, 2023). Artikel ini mempertemukan dua rumpun literatur tersebut untuk membaca pengalaman Indonesia pada 1945–1946.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa heterogenitas seragam BKR justru merupakan bentuk material dari transisi kedaulatan. Republik menggunakan benda-benda yang diwarisi dari Jepang dan kolonial Belanda, tetapi melakukan resignifikasi melalui penghapusan insignia lama, penambahan Merah Putih, penggunaan tanda lokal, dan penyesuaian fungsi. Proses ini dapat disebut dekolonisasi visual: perubahan otoritas politik diwujudkan melalui perubahan tanda pada tubuh. Karena itu, standardisasi yang kelak menjadi ciri tentara nasional bukan titik awal pembentukan identitas, melainkan hasil dari proses integrasi yang berlangsung bertahap.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Seragam sebagai Budaya Material dan Teknologi Sosial

Prown (1982) mengajukan budaya material sebagai cara memahami nilai, keyakinan, dan struktur sosial melalui benda. Pendekatan ini penting karena benda sering mempertahankan jejak praktik yang tidak selalu dijelaskan secara eksplisit dalam dokumen. Pada seragam, jejak itu dapat berupa bahan, potongan, jahitan, tambalan, posisi insignia, warna, atau kombinasi dengan perlengkapan lain. Dengan demikian, seragam BKR tidak cukup diklasifikasikan berdasarkan model pakaian; ia perlu ditafsirkan sebagai hasil hubungan antara ketersediaan material, latar personel, kebutuhan operasi, dan kehendak untuk menampilkan identitas Republik.

Konsep “teknologi sosial” digunakan di sini untuk menekankan bahwa seragam membantu mengatur perilaku dan persepsi. Pakaian yang sama atau relatif serupa menciptakan efek kebersamaan, mengurangi jarak antarpersonal, dan menegaskan subordinasi terhadap organisasi. Kajian klasik tentang seragam menunjukkan bahwa uniformitas berhubungan dengan status, legitimasi, dan kontrol organisasi (Joseph & Alex, 1972). Dalam militer, efek tersebut lebih kuat karena seragam terhubung dengan hierarki, komando, penghormatan, serta kewajiban hukum dan moral (Tynan, 2013; Stanar, 2023).

Seragam juga bersifat komunikatif. Ia dibaca oleh pemakai, sesama anggota, masyarakat, dan lawan. Warna, lencana, tanda pangkat, atau ikat lengan dapat menyampaikan afiliasi dan otoritas tanpa penjelasan verbal. Stapleton (2021) memperlihatkan bahwa simbol visual—seragam, emblem, colours, dan upacara—berperan dalam penciptaan budaya militer kolonial di Afrika Barat. Meskipun konteks Indonesia berbeda, temuan tersebut memberi perangkat komparatif: simbol visual dapat membentuk komunitas militer sekaligus menghubungkan organisasi dengan proyek politik yang lebih besar.

Identitas Militer, Performatifitas, dan Dekolonisasi Visual

Identitas militer bukan hanya kategori administratif, melainkan praktik yang dipelajari dan ditampilkan. Tubuh yang dilatih, cara berdiri, penghormatan, bahasa

komando, senjata, dan seragam membentuk performa keprajuritan. Lahiri (2024), dalam kajian mengenai Rani of Jhansi Regiment, menunjukkan bahwa seragam, latihan, senjata, dan disiplin tubuh dapat mematerialkan identitas militer antikolonial. Perspektif ini berguna untuk BKR karena pada 1945 identitas “tentara Republik” belum sepenuhnya stabil; ia harus diproduksi melalui tindakan dan simbol yang dapat dikenali.

Dekolonisasi visual dalam artikel ini dipahami sebagai proses pemutusan, pengubahan, dan pengambilalihan tanda-tanda material rezim sebelumnya. Proses tersebut tidak selalu berarti membuang seluruh benda kolonial. Dalam kondisi kelangkaan, pakaian, sepatu, sabuk, dan perlengkapan lama tetap dipakai. Yang berubah adalah rezim maknanya. Ketika insignia Jepang atau KNIL dilepas dan Merah Putih dipasang, objek yang sama memasuki tata simbol baru. Karena itu, dekolonisasi material dapat bersifat pragmatis sekaligus politis: mempertahankan fungsi benda sambil mengganti legitimasi yang diwakilinya.

Kerangka ini juga menghindari anggapan bahwa ketidakseragaman identik dengan ketiadaan identitas. Pada fase revolusioner, identitas dapat dibangun melalui “keseragaman minimum”: simbol tertentu—misalnya Merah Putih, ikat lengan, atau tanda organisasi—cukup untuk menandai loyalitas meskipun bentuk pakaian belum sama. Standardisasi penuh baru mungkin ketika negara memiliki rantai pasok, regulasi, struktur komando, dan kapasitas administratif yang lebih mapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik diarahkan pada sumber primer dan sekunder yang relevan dengan BKR dan pembentukan tentara Republik. Sumber primer meliputi arsip dan keputusan pemerintahan awal Republik, dokumentasi BKR/TKR, foto sezaman, serta dokumentasi visual yang memperlihatkan anggota BKR, bekas PETA, pemuda, dan kelompok bersenjata. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal nasional dan internasional, monograf sejarah Revolusi Indonesia, serta studi tentang budaya material dan seragam militer.

Kritik eksternal diterapkan dengan memperhatikan asal, tanggal, institusi pembuat, medium, dan konteks produksi sumber. Pada foto, kritik eksternal mencakup penelusuran keterangan, kemungkinan reproduksi, dan hubungan antara gambar dengan peristiwa yang diklaim. Kritik internal menilai maksud pembuat sumber, posisi politik, kemungkinan bias, serta konsistensi informasi dengan sumber lain. Foto tidak diperlakukan sebagai cermin transparan realitas; komposisi, pose, seleksi objek, dan keterangan foto juga merupakan bagian dari konstruksi makna.

Analisis visual dilakukan melalui empat lapis pembacaan: (1) identifikasi unsur pakaian—atasan, bawahan, penutup kepala, alas kaki, sabuk, dan perlengkapan; (2) identifikasi atribut—lencana, pita, armband, bendera, dan tanda pangkat; (3) penelusuran kemungkinan asal material—Jepang, KNIL, sipil, atau produksi lokal; dan (4) interpretasi hubungan unsur visual dengan konteks organisasi dan politik. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memastikan setiap model pakaian secara forensik apabila sumber tidak memadai, tetapi untuk membaca pola heterogenitas, modifikasi, dan resignifikasi.

Interpretasi dilakukan dengan triangulasi antara bukti visual, arsip, dan historiografi. Kerangka budaya material digunakan untuk menjelaskan hubungan benda dengan praktik sosial, sedangkan konsep identitas militer dan dekolonisasi visual digunakan untuk memahami transformasi makna. Dengan desain ini, klaim tentang warna atau model spesifik dibatasi pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan; foto hitam-putih, misalnya, tidak dijadikan dasar tunggal untuk menentukan warna tanpa dukungan sumber lain.

Secara temporal, penelitian memusatkan perhatian pada Agustus 1945 hingga fase awal 1946. Batas ini dipilih karena periode tersebut menangkap perubahan cepat dari BKR menuju TKR dan konsolidasi tentara Republik. Secara analitis, istilah “seragam BKR” digunakan secara hati-hati untuk merujuk pada pakaian dan atribut yang dikenakan anggota BKR dalam konteks kedinasan atau representasi organisasi, bukan untuk menyiratkan adanya satu regulasi seragam nasional yang baku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BKR sebagai Ruang Integrasi Tradisi Keprajurit

Pembentukan BKR pada 22 Agustus 1945 merupakan pilihan politik yang berhati-hati. Pemerintah Republik membutuhkan kekuatan keamanan, tetapi pembentukan tentara reguler secara langsung berisiko dibaca Sekutu sebagai tindakan konfrontatif. Karena itu, nomenklatur dan mandat awal BKR menekankan keamanan rakyat. Nugrahanto (2018) menempatkan BKR sebagai salah satu dasar legal-institusional paling penting bagi genealogi TNI karena PETA telah dibubarkan dan BKR menjadi organisasi keamanan pertama yang dibentuk setelah kemerdekaan. Dari BKR berkembang TKR, TRI, dan akhirnya TNI.

Namun, legalitas organisasi tidak serta-merta menghasilkan homogenitas personel. BKR menyerap individu dengan pengalaman berbeda. Mantan PETA membawa latihan Jepang dan pengalaman organisasi teritorial; mantan Heiho membawa pengalaman sebagai pasukan pembantu; sebagian mantan KNIL memiliki tradisi profesional kolonial; sedangkan pemuda dan laskar membawa legitimasi revolusioner berbasis mobilisasi lokal. Idris et al. (2022) menekankan kontribusi PETA terhadap pembentukan TNI, sementara Sofuan (2022) menunjukkan bahwa perbedaan latar PETA dan KNIL kemudian melahirkan rivalitas dan perbedaan orientasi di tubuh militer. Utama (2024) memperjelas perbedaan budaya latihan kedua tradisi tersebut.

Pluralitas asal-usul ini menjelaskan mengapa tubuh BKR tidak mungkin segera tampil dalam satu model seragam. Organisasi baru belum mempunyai kapasitas produksi dan distribusi yang dapat mengganti seluruh pakaian personel secara serentak. Dengan demikian, heterogenitas visual bukan anomali, tetapi konsekuensi struktural dari integrasi cepat. Pakaian menjadi semacam “lapisan sejarah” yang memperlihatkan masa lalu pemakainya sekaligus afiliasi barunya.

Pada titik ini, seragam membantu membaca proses institusionalisasi dari bawah. Perubahan organisasi biasanya direkonstruksi melalui keputusan pemerintah dan struktur komando. Akan tetapi, pada tingkat prajurit, institusionalisasi juga

berlangsung melalui praktik sehari-hari: mengenakan tanda baru, melepaskan simbol lama, menggunakan armband, mengikuti apel, dan tampil sebagai anggota kekuatan Republik. Praktik tersebut menghubungkan keputusan politik dengan pengalaman tubuh.

Heterogenitas Seragam: Kelangkaan, Warisan, dan Improvisasi

Dokumentasi periode awal memperlihatkan spektrum pakaian yang luas. Mantan personel PETA dapat mempertahankan unsur pakaian khaki bergaya Jepang; bekas personel KNIL atau mereka yang memperoleh perlengkapan kolonial menggunakan bagian-bagian pakaian lapangan yang tersedia; sementara anggota lain mengenakan pakaian sipil dengan sabuk, sepatu, penutup kepala, atau atribut yang memberi kesan kedinasan. Dalam kondisi revolusi, logika utama bukan kesesuaian dengan dress regulation nasional—yang belum mapan—melainkan ketersediaan, fungsi, dan kemampuan menampilkan afiliasi.

Kelangkaan logistik tidak boleh dipahami hanya sebagai kekurangan. Ia menghasilkan praktik improvisasi yang kreatif. Benda yang tersedia dipilih, dipertukarkan, dimodifikasi, atau digabungkan. Seragam lama dapat kehilangan emblem; pakaian sipil dapat memperoleh pita Merah Putih; topi atau lengan dapat diberi tanda pengenal. Dalam istilah budaya material, nilai sebuah benda berubah ketika konteks sosialnya berubah. Jaket yang sebelumnya menandai subordinasi kepada kekuatan pendudukan dapat, setelah modifikasi, menjadi bagian dari penampilan prajurit Republik.

Fenomena repurposing pakaian militer juga ditemukan dalam konteks lain. Kajian tentang penggunaan ulang busana militer menunjukkan bahwa makna pakaian tidak melekat secara permanen pada desain fisiknya; makna dapat berubah ketika pakaian berpindah pemakai, konteks, dan narasi (McDowell, 2024). Bagi BKR, repurposing berlangsung dalam situasi yang jauh lebih politis: transfer benda terjadi bersamaan dengan transfer kedaulatan. Karena itu, modifikasi pakaian bukan sekadar ekonomi material, melainkan ekonomi simbolik revolusi.

Heterogenitas juga mengandung dimensi regional. BKR tumbuh melalui pembentukan badan-badan di daerah, sedangkan akses terhadap bekas gudang, perlengkapan Jepang, tekstil, dan jaringan produksi berbeda antarwilayah. Hal ini memungkinkan munculnya variasi lokal. Dalam fase awal, tanda yang dapat dikenali secara cepat lebih penting daripada standardisasi potongan. Situasi tersebut sejalan dengan karakter revolusi yang sangat bergantung pada mobilisasi lokal dan inisiatif pemuda (Mulyatari et al., 2025).

Secara metodologis, temuan ini mengingatkan bahwa istilah “seragam kebesaran BKR” perlu dipakai dengan presisi. Bukti yang tersedia lebih kuat untuk menyatakan adanya pakaian kedinasan dan atribut identitas BKR yang heterogen daripada mengasumsikan satu model full dress nasional. Revisi terminologis ini penting bagi standar artikel ilmiah karena mencegah generalisasi yang melampaui sumber. Dalam konteks 1945, “kebesaran” lebih produktif dibaca sebagai fungsi representasional—pakaian yang menampilkan martabat dan otoritas organisasi—daripada sebagai kategori regulasi seragam yang sudah seragam secara nasional.

Merah Putih dan Penghapusan Insignia Lama: Dekolonisasi Visual

Transformasi paling penting bukan selalu perubahan potongan pakaian, tetapi perubahan tanda. Penghilangan lambang Jepang atau insignia kolonial memutuskan hubungan visual dengan otoritas sebelumnya. Penambahan Merah Putih—dalam bentuk pita, kain, armband, atau bendera kecil—menautkan tubuh pemakai dengan Republik. Tindakan sederhana tersebut memiliki daya politik tinggi karena kedaulatan yang baru diproklamasikan membutuhkan bentuk-bentuk yang dapat dilihat.

Dalam kerangka dekolonisasi visual, terdapat paradoks: Republik dapat menggunakan material warisan kolonial atau pendudukan sambil menolak otoritas politik yang sebelumnya diwakili material itu. Paradoks tersebut tidak menunjukkan inkonsistensi, melainkan pragmatisme revolusioner. Dekolonisasi tidak selalu dimulai dengan produksi benda yang sepenuhnya baru; ia dapat dimulai dengan merebut, menghapus, dan menulis ulang makna benda lama. Stapleton (2021)

menunjukkan bahwa simbol militer kolonial memiliki daya besar dalam membentuk kultur dan hierarki; setelah kemerdekaan, simbol-simbol semacam itu dapat diubah untuk menampilkan republikanisme dan aspirasi modern.

Merah Putih berfungsi sebagai tanda kompresi identitas. Di tengah variasi pakaian, satu kombinasi warna mampu menyatukan pemakai secara visual. Ia mengurangi ambiguitas dan menandai loyalitas. Dalam situasi ketika berbagai kelompok bersenjata beroperasi dan struktur komando belum sepenuhnya terkonsolidasi, tanda semacam ini mempunyai fungsi praktis sekaligus ideologis. Praktis karena membantu pengenalan; ideologis karena menghubungkan individu dengan simbol negara.

Perubahan insignia juga berkaitan dengan legitimasi. Seragam militer memperoleh otoritas bukan hanya dari desainnya, tetapi dari institusi yang diwakilinya. Ketika institusi lama kehilangan legitimasi, tanda-tandanya menjadi problematis. Sebaliknya, simbol Republik yang baru memperoleh daya karena dikenakan, dipertontonkan, dan diulang. Dengan demikian, legitimasi bergerak dua arah: negara memberi makna pada seragam, tetapi seragam juga membantu membuat negara terlihat nyata di ruang publik.

Seragam, Disiplin, dan Produksi Otoritas

Militer adalah organisasi yang mengandalkan keteraturan tubuh. Seragam merupakan bagian dari keteraturan itu karena menghubungkan tubuh individu dengan aturan kolektif. Kajian psikologis mengenai seragam militer menekankan perannya dalam status, kohesi, dan identitas bersama. Stanar (2023) menambahkan dimensi moral: seragam bukan hanya memberi hak dan kehormatan, tetapi juga menempelkan kewajiban pada pemakai. Walaupun BKR masih embrional, logika tersebut mulai bekerja ketika anggota tampil sebagai representasi badan keamanan Republik.

Pada fase BKR, disiplin visual belum identik dengan keseragaman tekstil. Disiplin dapat dibangun melalui cara mengenakan atribut, kepatuhan pada tanda organisasi, apel, komando, dan pembagian tugas. Artinya, standardisasi simbol dapat

mendahului standardisasi pakaian. Hal ini menjelaskan mengapa armband atau lencana sederhana menjadi penting: biaya materialnya rendah, tetapi kapasitas komunikasinya tinggi.

Seragam juga menciptakan jarak institusional antara pemegang otoritas keamanan dan masyarakat, sekaligus mempertahankan kedekatan dengan rakyat. BKR secara konseptual lahir sebagai badan keamanan rakyat, bukan tentara reguler yang sepenuhnya terpisah dari masyarakat. Karena itu, penampilan campuran antara pakaian sipil dan atribut militer justru mencerminkan posisi transisional tersebut. Tubuh anggota BKR berada di antara warga bersenjata dan prajurit negara.

Ketegangan antara “rakyat” dan “tentara” kemudian menjadi salah satu tema penting dalam perkembangan militer Indonesia. Pada 1945–1946, ketegangan itu belum diselesaikan secara doktrinal, tetapi sudah tampak secara material. Semakin teratur organisasi, semakin besar kebutuhan akan tanda pangkat, kesatuan, dan dress regulation yang konsisten. Peralihan BKR ke TKR karena itu bukan hanya perubahan nama dan struktur; ia membuka kebutuhan untuk meningkatkan uniformitas sebagai bagian dari profesionalisasi.

Seragam sebagai Arena Negosiasi Identitas PETA, KNIL, dan Pemuda

Perbedaan latar pendidikan militer membuat seragam juga dapat dibaca sebagai jejak identitas kelompok. Bekas KNIL mengenal tradisi seragam yang lebih terstandar dalam tentara kolonial profesional. Bekas PETA mengalami sistem latihan Jepang yang menekankan mobilisasi, hierarki, dan semangat pengorbanan. Pemuda revolusioner memperoleh legitimasi terutama dari aksi dan keberanian. Ketika mereka masuk ke BKR/TKR, identitas-identitas tersebut tidak hilang seketika.

Utama (2024) menunjukkan bahwa perbedaan KNIL dan PETA tidak terbatas pada teknik latihan, tetapi juga kultur pendidikan. Sofuan (2022) memperlihatkan dampaknya dalam rivalitas awal kemiliteran Indonesia. Dari perspektif material, perbedaan tersebut memungkinkan seragam dan gaya penampilan menjadi penanda latar pengalaman, meskipun hubungan itu tidak boleh diasumsikan secara otomatis tanpa bukti individual. Yang lebih aman disimpulkan adalah bahwa pluralitas tradisi

keprajuritan menyediakan repertoar material dan simbolik yang kemudian dinegosiasikan oleh organisasi baru.

Proses negosiasi ini menghasilkan identitas hibrida. “Tentara Indonesia” tidak dibangun dengan menyalin PETA atau KNIL secara utuh. Republik menyerap kompetensi, personel, benda, dan praktik dari keduanya, sekaligus berusaha meletakkannya di bawah legitimasi nasional. Dalam konteks ini, Merah Putih dan nomenklatur organisasi baru mempunyai fungsi integratif: keduanya memberi kerangka makna bersama di atas perbedaan asal-usul.

Konsep hibriditas tidak berarti identitas nasional lemah. Sebaliknya, kemampuan mengintegrasikan unsur heterogen merupakan salah satu syarat pembentukan institusi. Negara pascakolonial hampir selalu mewarisi sebagian infrastruktur, hukum, birokrasi, atau praktik dari rezim sebelumnya. Tantangannya adalah mengubah arah loyalitas dan dasar legitimasinya. Seragam BKR menunjukkan proses tersebut dalam skala mikro: kain lama, simbol baru, tubuh yang sama, tetapi klaim kedaulatan berubah.

Dari BKR ke TKR: Standardisasi sebagai Proses Institusional

Perubahan BKR menjadi TKR pada Oktober 1945 menandai peningkatan kebutuhan akan organisasi militer yang lebih jelas ketika konflik bersenjata membesar. Evolusi menuju TKR, TRI, dan TNI menunjukkan bahwa negara bergerak dari badan keamanan yang longgar menuju angkatan bersenjata yang lebih terstruktur (Nugrahanto, 2018). Transformasi tersebut secara logis diikuti tuntutan standardisasi: komando, pangkat, administrasi, latihan, persenjataan, dan penampilan.

Standardisasi seragam perlu dipahami sebagai bagian dari kapasitas negara. Untuk menetapkan pakaian yang sama, pemerintah memerlukan regulasi, desain, produksi, anggaran, distribusi, ukuran, inspeksi, dan mekanisme penggantian. Pada Agustus 1945, sebagian besar prasyarat itu belum tersedia. Karena itu, ketidakseragaman BKR bukan kegagalan desain, melainkan indikator tahap

institusional. Semakin berkembang kapasitas organisasi, semakin mungkin identitas visual diatur secara nasional.

Dari sudut teori organisasi, seragam mengurangi ketidakpastian identitas. Ia membuat anggota mudah dikenali dan menampilkan konsistensi institusi. Namun, pada organisasi yang baru lahir, standardisasi simbolis sering lebih realistis daripada standardisasi material penuh. BKR menunjukkan pola tersebut: simbol nasional dan tanda pengenalan dapat menyebar lebih cepat daripada set pakaian lengkap.

Dengan demikian, hubungan antara seragam dan institusionalisasi bersifat timbal balik. Organisasi yang kuat mampu menyeragamkan anggotanya; pada saat yang sama, penyeragaman membantu memperkuat organisasi dengan menciptakan citra keteraturan, disiplin, dan otoritas. Dalam revolusi, citra itu mempunyai nilai strategis karena Republik harus meyakinkan rakyat, lawan, dan pihak internasional bahwa ia bukan sekadar kumpulan kelompok bersenjata, tetapi negara dengan perangkat keamanan yang berkembang.

Dimensi Sosial dan Politik: Tubuh Prajurit sebagai Representasi Republik

Seragam mengubah tubuh individual menjadi permukaan representasi negara. Ketika anggota BKR berjaga di fasilitas publik, mengikuti upacara, berpatroli, atau berfoto dalam formasi, masyarakat berhadapan dengan bentuk konkret otoritas Republik. Dalam keadaan ketika kantor, anggaran, dan birokrasi masih terbatas, tubuh berseragam menjadi salah satu medium negara yang paling langsung terlihat.

Fungsi representasional ini menjelaskan pentingnya dokumentasi visual. Foto bukan hanya merekam apa yang dikenakan, tetapi juga bagaimana anggota ingin ditampilkan: berbaris, membawa senjata, berdiri di bawah bendera, atau berkumpul sebagai satuan. Pose dan formasi menampilkan keteraturan. Karena itu, analisis foto perlu membaca pakaian bersama gestur, ruang, senjata, bendera, dan susunan kelompok.

Seragam juga mengandung klaim kesetaraan internal: individu yang berbeda latar sosial ditempatkan dalam kategori anggota organisasi. Namun, pada saat yang sama, tanda pangkat dan fungsi memproduksi hierarki. Inilah paradoks dasar

seragam—menyatukan dan membedakan sekaligus. Joseph dan Alex (1972) telah menunjukkan fungsi seragam dalam mengkomunikasikan status; pada militer, diferensiasi itu penting untuk rantai komando.

Pada BKR, sistem tanda pangkat yang belum sepenuhnya seragam menunjukkan bahwa proses diferensiasi internal masih berkembang. Karena itu, identitas kolektif Republik mungkin lebih dahulu terbentuk daripada bahasa visual hierarki yang baku. Temuan ini memperkuat tesis bahwa pembentukan militer nasional berlangsung berlapis: loyalitas dan simbol nasional dapat terkonsolidasi lebih cepat daripada administrasi dan standardisasi teknis.

Relevansi Historiografis: Dari Sejarah Pertempuran ke Sejarah Material Militer

Historiografi Revolusi Indonesia kaya dengan kajian politik, diplomasi, kekerasan, pemuda, dan pertempuran. Kajian terbaru mengenai radikalisme pemuda di Semarang, misalnya, memperlihatkan bagaimana pengalaman pendudukan dan ideologi membentuk mobilisasi revolusioner (Mulyatari et al., 2025). Kajian mengenai identitas regional juga menunjukkan bahwa revolusi merupakan proses negosiasi identitas yang tidak tunggal (Mulyatari, 2020). Perspektif material menambahkan pertanyaan berbeda: melalui benda apa identitas dan otoritas tersebut diwujudkan?

Dengan menjadikan seragam sebagai sumber, sejarah militer dapat bergerak melampaui institusi dan operasi. Benda memungkinkan peneliti membaca kehidupan sehari-hari prajurit, keterbatasan logistik, hubungan dengan industri tekstil dan pasar, proses apropriasi, serta politik simbol. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan *military history* yang semakin memperhatikan budaya, tubuh, gender, emosi, dan representasi, bukan hanya strategi dan pertempuran.

Kajian komparatif internasional memperkuat nilai pendekatan tersebut. Stapleton (2021) menunjukkan bagaimana simbol visual membentuk kultur militer kolonial dan kemudian mengalami penyesuaian pada masa kemerdekaan. Lahiri (2024) memperlihatkan bahwa identitas militer antikolonial dimaterialkan melalui tubuh, seragam, latihan, dan senjata. Stanar (2023) mengingatkan bahwa seragam juga membawa tuntutan moral profesi. Dibaca bersama, literatur ini memungkinkan



pengalaman BKR ditempatkan dalam percakapan global tentang perang, dekolonisasi, dan pembentukan institusi militer.

Kontribusi khusus kasus Indonesia terletak pada kecepatan transformasinya. Dalam hitungan minggu setelah proklamasi, otoritas baru harus membentuk perangkat keamanan dari material dan personel yang tersedia. Karena itu, perubahan visual pada pakaian memberi bukti yang sangat padat mengenai perubahan kedaulatan. Helaian kain, lencana, dan pita menjadi tempat pertemuan antara kelangkaan ekonomi, memori kolonial, mobilisasi revolusioner, dan aspirasi negara modern.

DISKUSI

Temuan penelitian memungkinkan tiga proposisi. Pertama, identitas militer dapat mendahului uniformitas material. Pada BKR, rasa keanggotaan dan loyalitas Republik dibangun dalam keadaan pakaian sangat beragam. Yang dibutuhkan pada tahap awal adalah simbol minimum yang cukup kuat untuk mengikat dan membedakan. Ini menantang asumsi bahwa organisasi militer baru memperoleh identitas setelah memiliki dress regulation yang seragam.

Kedua, materialitas revolusi bersifat palimpsestik: lapisan lama tidak sepenuhnya hilang, tetapi ditimpa makna baru. Seragam Jepang atau kolonial yang dimodifikasi memperlihatkan kesinambungan material dan diskontinuitas politik secara bersamaan. Perspektif ini lebih akurat daripada narasi pemutusan total karena negara baru secara faktual harus bekerja dengan sumber daya warisan perang dan kolonialisme.

Ketiga, dekolonisasi visual merupakan bagian dari state-making. Penggantian insignia bukan tindakan dekoratif. Ia mengubah siapa yang berhak diwakili oleh tubuh bersenjata. Dalam rezim kolonial, seragam menghubungkan prajurit dengan kerajaan atau pemerintahan pendudukan; dalam Republik, tanda baru menghubungkannya dengan bangsa dan negara yang baru diproklamasikan. Perubahan simbol karenanya merupakan perubahan legitimasi.

Temuan ini juga memberi implikasi metodologis. Foto seragam BKR perlu dikatalogkan secara lebih sistematis dengan metadata tanggal, lokasi, satuan, tokoh, sumber, dan provenans. Penelitian berikutnya dapat menggunakan perbandingan antardaerah—Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, dan wilayah lain—untuk menguji apakah pola atribut dan tingkat standardisasi berbeda. Analisis museum dan koleksi keluarga juga berpotensi menemukan artefak yang belum terdokumentasi dalam arsip negara.

Selain itu, penelitian tekstil dapat memperkuat identifikasi material. Analisis serat, teknik jahit, cap pabrik, tombol, gesper, dan insignia memungkinkan penelusuran rantai pasok dan asal perlengkapan. Pendekatan semacam ini akan membawa sejarah militer Indonesia lebih dekat pada object-based history dan conservation science tanpa kehilangan konteks politiknya.

Bagi kajian pertahanan kontemporer, sejarah ini mengingatkan bahwa identitas institusional dibangun melalui kombinasi doktrin dan simbol. Seragam tetap memiliki fungsi profesional, etis, dan representasional. Namun, pengalaman BKR menunjukkan bahwa simbol paling efektif ketika memiliki legitimasi sosial: Merah Putih bermakna bukan karena materialnya mahal, melainkan karena menghubungkan prajurit dengan klaim kemerdekaan yang dipahami masyarakat.

KESIMPULAN

Seragam BKR pada 1945–1946 merupakan sumber penting untuk memahami pembentukan identitas militer nasional Indonesia. Keragamannya mencerminkan keterbatasan logistik, tetapi penjelasan tersebut belum cukup. Heterogenitas pakaian juga merekam pluralitas asal-usul personel, kecepatan mobilisasi, dan proses integrasi tradisi PETA, Heiho, KNIL, pemuda, serta laskar ke dalam otoritas Republik.

Penggunaan kembali pakaian Jepang dan kolonial, penghilangan insignia lama, serta penambahan simbol Merah Putih menunjukkan proses dekolonisasi visual. Republik tidak selalu mengganti benda lama; ia mengubah rezim maknanya. Dalam

proses itu, seragam menjadi medium legitimasi, disiplin, pengenalan, solidaritas, dan representasi negara.

Artikel ini menegaskan bahwa identitas militer tidak menunggu standardisasi selesai. Justru standardisasi tumbuh dari proses negosiasi identitas dan penguatan kapasitas institusional. BKR memperlihatkan tahap ketika “keseragaman simbolis” lebih dahulu terbentuk daripada keseragaman material penuh. Transformasi menuju TKR dan kemudian TNI memperluas kebutuhan standardisasi sejalan dengan konsolidasi komando dan administrasi.

Secara historiografis, kajian ini memperluas sejarah Revolusi Indonesia dengan memasukkan materialitas sebagai kategori analisis. Seragam bukan pelengkap ilustratif bagi narasi organisasi dan pertempuran, melainkan bukti yang dapat menjelaskan bagaimana kedaulatan diwujudkan pada tubuh. Penelitian lanjutan perlu membangun katalog visual lintas daerah, menelusuri artefak museum dan koleksi privat, serta mengintegrasikan analisis tekstil dan provenans agar rekonstruksi seragam militer awal Republik semakin presisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. R. O’G. (1972). *Java in a time of revolution: Occupation and resistance, 1944–1946*. Cornell University Press.
- Cribb, R. (1991). *Gangsters and revolutionaries: The Jakarta people’s militia and the Indonesian revolution, 1945–1949*. University of Hawai’i Press.
- Craik, J. (2005). *Uniforms exposed: From conformity to transgression*. Berg.
- Gottschalk, L. (1950). *Understanding history: A primer of historical method*. Alfred A. Knopf.
- Idris, A. M., Thamrin, S., Yoegiantoro, D., & Triprasetyo, R. A. (2022). Kontribusi Pembela Tanah Air (PETA) dalam pembentukan TNI dengan pendekatan historis dan ilmu pertahanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1256>



- Joseph, N., & Alex, N. (1972). The uniform: A sociological perspective. *American Journal of Sociology*, 77(4), 719–730.
- Kartodirdjo, S. (1992). Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (1995). Metodologi sejarah. Tiara Wacana.
- Lahiri, S. (2024). Performing anti-colonial military identities in the Rani of Jhansi Regiment, 1943–1945: War, diasporic women and decolonisation. *Gender & History*, 36(2), 602–619. <https://doi.org/10.1111/1468-0424.12677>
- McDowell, A. (2024). Uniform-undone: A study in the repurposing of military attire through history and in experimental practice. *Critical Studies in Men's Fashion*. https://doi.org/10.1386/csmf_00077_1
- Mulyatari, D. (2020). Contending and compromising: The formation of eastern Indonesian identity during the revolution (1945–1950). *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 28(4), 3375–3389. <https://doi.org/10.47836/PJSSH.28.4.47>
- Mulyatari, D., Abdurakhman, Haghia, R. S., & Rahman, S. S. (2025). Forging a new nation: The role of youth radicalism in Semarang's revolutionary struggle, 1945–1947. *Paramita: Historical Studies Journal*, 35(2). <https://doi.org/10.15294/paramita.v35i2.16485>
- Nugrahanto, W. (2018). BKR (Badan Keamanan Rakyat): Cikal bakal tentara Indonesia? *Metahumaniora*, 8(3), 389–398. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v8i3.20718>
- Prown, J. D. (1982). Mind in matter: An introduction to material culture theory and method. *Winterthur Portfolio*, 17(1), 1–19.
- Reid, A. (1974). The Indonesian National Revolution, 1945–1950. Longman.
- Roynette, O. (2012). L'uniforme militaire au XIXe siècle: Une fabrique du masculin. *Clio*, 36, 109–128. <https://doi.org/10.4000/clio.10887>
- Sato, S. (2006). Indonesia 1939–1942: Prelude to the Japanese occupation. *Journal of Southeast Asian Studies*, 37(2), 225–248. <https://doi.org/10.1017/S0022463406000531>



- Sluimers, L. (1996). The Japanese military and Indonesian independence. *Journal of Southeast Asian Studies*, 27(S1).
- Sofuan, T. K. (2022). Rivalitas KNIL dan PETA dalam sejarah kemiliteran Indonesia pada masa awal kemerdekaan. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 4(2). <https://doi.org/10.32585/keraton.v4i2.3496>
- Stanar, D. (2023). Moral dimension of military uniform. *Vojno Delo*, 75(2), 1–13. <https://doi.org/10.5937/vojdelo2302001S>
- Stapleton, T. (2021). Visual symbols and military culture in Britain's West African colonial army (c. 1900–60). *International Journal of Military History and Historiography*, 41(1), 42–78.
- Utama, T. R. (2024). Comparative analysis of Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) and Pembela Tanah Air (PETA) military training as precursors to the Indonesian National Armed Forces. *Jurnal Pertahanan*, 10(2), 201–219. <https://doi.org/10.33172/jp.v10i2.19532>
- Woodward, I. (2007). *Understanding material culture*. Sage.
- Yulianti, I., Sumantri, Y. K., & Winarko, A. (2022). Enrichment materi pembelajaran sejarah tentang peranan peranakan Arab pada masa pergerakan kemerdekaan. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.30197>
- Safarani, J. A. (2023). Monumen dan Museum PETA sebagai sarana edukasi sejarah dalam mempertahankan identitas bangsa. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*.
- Rut, S., Zalukhu, D., Nazwa, D., & Sinaga, R. (2024). Pendudukan Jepang di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 9371–9382. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.15713>
- Benda, H. J. (1956). The beginnings of the Japanese occupation of Java. *The Journal of Asian Studies*, 15(4), 541–560.



- Akashi, Y. (1980). Nugroho Notosusanto, The Peta Army During the Japanese Occupation of Indonesia [Review]. *Southeast Asia: History and Culture*, 9, 138–142. <https://doi.org/10.5512/sea.1980.138>
- Tynan, J. (2013). Military dress and men's outdoor leisurewear: Burberry's trench coat in First World War Britain. *Journal of Design History*, 26(2), 139–156.
- Shirazi, F. (2026). Uniforms: Intersection of religion, identity, and institutional policy in the US Armed Forces. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 10(6), 9780–9798. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2026.100600686>
- Isnaini, M., Subaryana, & Supriyadi, Y. (2023). Peranan Jenderal Sudirman terhadap perkembangan TNI di Indonesia tahun 1946–1950. *Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*.
- Suwirta, A. (2015). Memaknai peristiwa Sumpah Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam perspektif pendidikan. *Sipatahoenan*.
- Yulianto, A. (2017). Brigjen Kretarto dalam peristiwa Revolusi Fisik di Surabaya 1945–1950. *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Said, S. (2001). *Genesis of power: General Sudirman and the Indonesian military in politics, 1945–1949*. ISEAS.
- Nasution, A. H. (1977). *Sekitar perang kemerdekaan Indonesia (Jilid I)*. Disjarah TNI AD.